

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARAN DALAM PENGADAAN
BARANG DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA PADA TAHUN ANGGARAN 2015
(Studi Kasus Pengadaan Excavator Mini)**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata-2
Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARAN DALAM PENGADAAN BARANG
DI PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA PADA TAHUN
ANGGARAN 2015 (Studi Kasus Pengadaan Barang Excavator Mini)**

**(Handri Yuliana, 140122019, Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 115 Halaman)**

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku sesuai metode serta proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Pengadaan barang dan jasa ini pada dasarnya melibatkan pihak pengguna barang dan jasa serta pihak penyedia barang dan jasa. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu : 1). penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah (studi kasus pengadaan barang excavator mini), 2). Bagaimana sinkronisasi normatif penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta sinkronisasinya dalam penerapan prinsip tersebut. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen serta data yang diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1). kegiatan pengadaan barang/jasa dalam hal ini tentang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat 1 (satu) unit Excavator Mini sebagai bahan penelitian dari penulis berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dibuktikan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Excavator Mini Nomor 680/01/PAB-APBD/UPTALKAL-DPU/IV-2015, 2). Sinkronisasi normatif penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah yaitu terdapat beberapa ketentuan yang melarang berbagai tindakan yang bisa memicu tidak diterapkannya prinsip transparan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain Penyusunan, Menggabungkan atau memecah paket pekerjaan, Penggelumbungan harga, Mengurangi kuantitas dan atau kualitas barang dan jasa, Penunjukan langsung dan Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan.

Kata kunci : Penerapan Prinsip, Pengadaan Barang

**THE APPLICATION OF TRANSPARENCY PRINCIPLE IN THE
GOVERNMENT OF DHAMASRAYA REGENCY IN FISCAL YEAR 2015
(Case Study of Procurement of Mini Excavator)**

**(Handri Yuliana, 140122019, Notaries Master Study Program, Law Faculty
of Andalas University, 2017, 115 Halaman)**

ABSTRACT

The procurement of goods and services is an effort to obtain the goods and services required is based on the logical thinking, systematic, following the norms and ethics that apply appropriate methods and the raw procurement. The procurement of goods and services is essentially an attempt to obtain or realize the desired of goods and services in accordance with the methods and process to reach a deal price, time and other agreements. The procurement of goods and services basically involve the users of goods and services and the providers of goods and services. The problems which are discussed in this research are: 1). the application of transparency principle in the procurement of the government (the case study of procurement of mini excavator), 2). How the normative synchronization of application of transparency principle in the procurement of the government is. The methodology of this research is sociology juridical. This research is descriptive research, because this research is aimed to give a comprehensive picture of the application of transparency principle in the procurement and the normative synchronization of the application of the transparency procurement of the government. The sources and data in this research are primary and secondary data. The data collection techniques used in this research is interview and documentary study which use qualitative data analysis. Based on the result of this research and discussion, it can be concluded that: 1) the procurement of goods and services in this case on the activities off the Procurement of Heavy Equipment 1 (one) unit Excavator Mini as the research material from the author goes according to the rules and procedures on the presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning the Procurement of Government Goods/Services. This is evidenced from Employment Agreement (Contract) the Procurement of Mini Excavator No. 680/01/PAB-APBD/UPTALKAL-DPU/IV-2015, 2) the application of normative synchronization of the principle of transparency in the procurement of goods by the local government that there are some requirements which prohibit a range of actions that could lead to failure to apply the transparency principle in the procurement of government goods and services, among others Bribery Merge or split the work packages, the high raises of price, reduce the quantity and or quality of goods and services, direct appointment and collusion between the provider and the procurement manager.

Keyword: Principles Application, Procurement